



BUPATI PESISIR SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/ 320 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

DAFTAR ELEMEN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Element Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan telah dirubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 12 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten pesisir selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MENETAPKAN

Memutuskan

- KESATU : Daftar Elemen Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Satu data Indonesia terdiri dari data-data yang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibutuhkan didalam penyusunan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : NOMOR : 050/ 320 / ktps/BPT-PS/2023
TENTANG : DAFTAR ELEMEN DATA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	kode	Elemen Data	Produsen Data/Penanggung Jawab	Jadwal Rilis
1	PEMKABPESSEL-DAD.08.01.01.02	Jumlah Pernikahan, Talak dan Cerai Menurut Kecamatan	DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN	Bulanan
2	PEMKABPESSEL-DAD.09.06.04.01	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tahunan
3	PEMKABPESSEL-DAD.09.06.04.02	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tahunan
4	PEMKABPESSEL-DAD.09.06.04.03	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tahunan
5	PEMKABPESSEL-DAD.09.06.04.04	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tahunan
6	PEMKABPESSEL-DAD.09.06.04.05	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tahunan

7	PEMKABPESSEL-DAD.09.06.04.06	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tahunan
8	PEMKABPESSEL-DAD.09.06.04.07	Kehadiran ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Bulanan
9	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.11	Jumlah Pemilih Terdaftar Pada Pemilu	BADAN KESATUAN BANGKSA DAN POLITIK	5 Tahun
10	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.12	Jumlah Pemilih Terdaftar Pada Pemilu Menurut Kecamatan	BADAN KESATUAN BANGKSA DAN POLITIK	5 Tahun
11	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.13	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dan Jumlah Wajib Pilih yang Memberikan Suara di TPS Pada Pemilu Legislatif Menurut Kecamatan	BADAN KESATUAN BANGKSA DAN POLITIK	5 Tahun
12	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.14	Jumlah Suara yang Diperoleh Masing-Masing Orsospol	BADAN KESATUAN BANGKSA DAN POLITIK	5 Tahun
13	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.15	Komposisi Keanggotaan DPRD	BADAN KESATUAN BANGKSA DAN POLITIK	5 Tahun

14	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.16	Jumlah Suara yang diperoleh Masing-Masing Orsospol Menurut Wilayah Pemilihan	BADAN KESATUAN BANGKSA DAN POLITIK	5 Tahun
15	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.17	Komposisi Keanggotaan DPRD Menurut Wilayah Pemilihan dan Orsospol	BADAN KESATUAN BANGKSA DAN POLITIK	5 Tahun
16	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.18	Jumlah Pemilih Terdaftar Pada Pemilihan Kepala Daerah Menurut Kecamatan	BADAN KESATUAN BANGKSA DAN POLITIK	5 Tahun
17	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.19	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Wajib Pilih yang Memberikan Suara di TPS Pada Pemilihan Kepala Daerah Menurut Kecamatan	BADAN KESATUAN BANGKSA DAN POLITIK	5 Tahun
18	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.01	penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal (Kebencanaan)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
19	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.02	jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
20	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.04	penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal (Kebencanaan)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Triwulan/Tahunan

21	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.05	jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (Kebencanaan)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
22	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.06	warga negara yang ikut pelatihan (Kebencanaan)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
23	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.07	warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
24	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.08	warga negara yang mendapat peralatan perlindungan (Kebencanaan)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
25	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.09	kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (Kebencanaan)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
26	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.10	kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
27	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.11	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
28	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.12	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan

29	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.14	Jumlah Desa /Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
30	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.15	Jumlah Korban Terdampak yang diakibatkan oleh Bencana Alam Dirinci Menurut Kecamatan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
31	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.16	Jumlah Rumah yang Rusak diakibatkan oleh Bencana Alam dirinci Menurut Tingkat Kerusakan dan Kecamatan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
32	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.24	korban bencana yang mendapat makanan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
33	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.25	korban bencana yang menerima paket sandang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
34	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.26	tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
35	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.27	paket permakanan khusus bagi kelompok rentan (Kebencanaan)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
36	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.28	korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan

37	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.29	Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia (Kebencanaan)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
38	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.05	Jumlah Kejadian Bencana Alam Dirinci Menurut Kecamatan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
39	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.06.01	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tahunan
40	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.06.02	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tahunan
41	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.06.03	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tahunan
42	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.06.04	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tahunan
43	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.06.05	Nilai realisasi SiLPA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tahunan
44	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.06.06	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Jenis Pendapatan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tahunan

45	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.06.07	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Jenis Belanja	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tahunan
46	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.06.08	Target dan Realisasi PBB Menurut Kecamatan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tahunan
47	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.06.09	Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Jenis Penerimaan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tahunan
48	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.06.10	Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Selatan Dirinci Menurut Sumber Penerimaan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tahunan
49	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.06.11	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Dirinci Menurut Jenis Pajak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tahunan
50	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.11	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
51	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.12	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan

52	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.13	Distribusi Persentase Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
53	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.14	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
54	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.15	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
55	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.16	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
56	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.17	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
57	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.18	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
58	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.01	Indeks Pembangunan Manusia	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan

59	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.02	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
60	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.03	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
61	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.04	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
62	PEMKABPESSEL-DAD.02.10.03.01	Pertumbuhan Ekonomi	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
63	PEMKABPESSEL-DAD.05.03.01.01	Indek Reformasi Birokrasi	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
64	PEMKABPESSEL-DAD.09.02.10.01	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tahunan
65	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.06	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	Tahunan
66	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.07	Skor Nilai LPPD	SEKRETARIAT DAERAH	Tahunan

67	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.08	Level Maturitas SPIP Pemda	INSPEKTORAT	Tahunan
68	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.09	Indeks Kelembagaan	SEKRETARIAT DAERAH	Tahunan
69	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.10	Indeks SPBE	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
70	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.11	Indeks Profesionalitas ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tahunan
71	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.12	Kategori keterbukaan informasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
72	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.13	Indek Inovasi Daerah	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
73	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.14	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	SEKRETARIAT DAERAH	Tahunan
74	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.15	Usia Harapan Hidup	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan

75	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.16	Angka Kematian Bayi	DINAS KESEHATAN	Tahunan
76	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.17	Angka Kematian Ibu	DINAS KESEHATAN	Tahunan
77	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.18	Prevalensi Stuting	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
78	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.19	Angka Kesakitan	DINAS KESEHATAN	Tahunan
79	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.20	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	Tahunan
80	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.21	Tingkat Kemiskinan	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
81	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.22	Indeks Gini	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
82	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.23	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk memenuhi kebutuhan dasar	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan

83	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.24	Pencapaian skor pola pangan harapan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Tahunan
84	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.25	Pengeluaran Perkapita	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
85	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.26	Nilai PDRB (ADHK)	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
86	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.27	Nilai PDRB Skor industri pengolahan (ADHK)	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
87	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.28	Tingkat Pengangguran Terbuka	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
88	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.29	Rasio Konektivitas	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
89	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.30	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
90	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.31	Indeks kualitas lingkungan hidup	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

91	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.32	Jumlah Sarapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan sektor ekonomi kreatif	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
92	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.33	Jumlah kunjungan wisatawan	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
93	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.34	Lama tinggal wisatawan	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
94	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.35	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
95	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.36	Persentase pemenuhan dan standar pendidikan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tahunan
96	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.37	Harapan lama sekolah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tahunan
97	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.38	Rata-Rata lama sekolah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tahunan
98	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.39	Jumlah Tenaga Pendidikan dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tahunan

99	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.40	Indeks daya saing daerah bidang SDM	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tahunan
100	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.41	Indek Pembangunan literasi masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH	Tahunan
101	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.42	Pemenuhan Kewajiban membayar zakat harta	SEKRETARIAT DAERAH	Tahunan
102	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.43	Tingkat Partisipasi subuh berjamaah di mesjid / musholla	SEKRETARIAT DAERAH	Tahunan
103	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.44	Jumlah Pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
104	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.45	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
105	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.47	Proposal kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
106	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.48	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

107	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.49	Jumlah nagari tangguh bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tahunan
108	PEMKABPESSEL-DAD.09.05.02.50	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
109	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.07.01	Penerbitan akta perkawinan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tahunan
110	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.07.02	Penerbitan akta perceraian	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tahunan
111	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.07.03	Penerbitan akta kematian	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tahunan
112	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.07.04	Penyajian data kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tahunan
113	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.07.05	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tahunan
114	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.07.06	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tahunan

115	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.07.07	Jumlah Penduduk Wajib KTP-Eletronik Menurut Kecamatan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tahunan
116	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.01	RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	DINAS KESEHATAN	Tahunan
117	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.02	RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	DINAS KESEHATAN	Tahunan
118	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.03	dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Ibu Hamil)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
119	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.04	dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Persalinan)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
120	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.05	dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Bayi Baru Lahir)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
121	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.06	dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Balita)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
122	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.07	dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Anak Usia SD)	DINAS KESEHATAN	Tahunan

123	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.08	dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Usia 15 - 29 Tahun)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
124	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.09	dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Usia 60 Tahun Keatas)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
125	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.10	dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Hipertensi)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
126	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.11	dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Diabetes Melitus)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
127	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.12	dukungan logistik kesehatan yang tersedia (DDGJ)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
128	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.13	dukungan logistik kesehatan yang tersedia (TBC)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
129	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.14	dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Risiko HIV)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
130	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.15	Jumlah Desa /Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan	DINAS KESEHATAN	Tahunan

131	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.16	daya tampung rumah sakit rujukan	DINAS KESEHATAN	Tahunan
132	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.17	RS Rujukan yang terakreditasi	DINAS KESEHATAN	Tahunan
133	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.18	ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	Tahunan
134	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.19	ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	DINAS KESEHATAN	Tahunan
135	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.20	bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	Tahunan
136	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.21	balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	Tahunan
137	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.22	anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	Tahunan
138	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.23	usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	Tahunan

139	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.24	usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	Tahunan
140	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.25	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	Tahunan
141	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.26	penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	Tahunan
142	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.27	penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	Tahunan
143	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.28	penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	Tahunan
144	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.29	orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	DINAS KESEHATAN	Tahunan
145	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.30	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas Menurut Kecamatan	DINAS KESEHATAN	Tahunan
146	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.31	Jumlah dan Kapasitas Tempat Tidur pada Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kecamatan	DINAS KESEHATAN	Tahunan

147	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.32	Jumlah Kunjungan Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kecamatan	DINAS KESEHATAN	Tahunan
148	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.33	Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak	DINAS KESEHATAN	Tahunan
149	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.34	Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Kecamatan	DINAS KESEHATAN	Tahunan
150	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.35	Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Dirujuk, Gizi Buruk, Keguguran, dan Kematian Ibu Sewaktu Melahirkan	DINAS KESEHATAN	Tahunan
151	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.36	Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
152	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.37	Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Menurut Kecamatan	DINAS KESEHATAN	Tahunan
153	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.38	Jumlah Izin Bidang Kesehatan yang Dikeluarkan	DINAS KESEHATAN	Tahunan

154	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.03.39	Jumlah Penyuluhan Pada Usia Remaja Usia 15-24 Tahun Tentang Kesehatan Reproduksi (Kespro), HIV/AIDS Dan Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan	DINAS KESEHATAN	Tahunan
155	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.04.01	SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal (Ibu Hamil)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
156	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.04.02	SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (Persalinan)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
157	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.04.03	SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar (Bayi Baru Lahir)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
158	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.04.04	SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Balita)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
159	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.04.05	SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar (Anak Usia SD)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
160	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.04.06	SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Usia 15 - 29 Tahun)	DINAS KESEHATAN	Tahunan

161	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.04.07	SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Usia 60 Tahun Keatas)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
162	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.04.08	SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Hipertensi)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
163	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.04.09	SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Diabetes Melitus)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
164	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.04.10	SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (ODGJ)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
165	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.04.11	SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (DBC)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
166	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.04.12	SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Risiko HIV)	DINAS KESEHATAN	Tahunan
167	PEMKABPESSEL-DAD.04.01.04.13	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan	DINAS KESEHATAN	Tahunan

168	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.01	perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
169	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.02	perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
170	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.03	sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
171	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.04	kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan

172	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.05	perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
173	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.06	perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
174	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.07	layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
175	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.08	layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan

176	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.09	sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
177	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.10	layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
178	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.11	perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
179	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.12	perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
180	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.13	perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
181	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.14	data yang dapat berbagi pakai	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
182	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.15	perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan

183	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.16	ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
184	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.17	peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
185	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.01.18	Jumlah Aplikasi Elektronik Government (E-Government)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
186	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.02.02	survey statistik sektoral yang dilakukan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
187	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.02.03	kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
188	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.02.04	survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
189	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.02.05	kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
190	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.02.06	kelengkapan metadata kegiatan statistik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan

191	PEMKABPESEL-DAD.09.03.02.07	kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
192	PEMKABPESEL-DAD.09.03.04.01	komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
193	PEMKABPESEL-DAD.09.03.04.02	konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
194	PEMKABPESEL-DAD.09.03.04.03	diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
195	PEMKABPESEL-DAD.09.03.04.04	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
196	PEMKABPESEL-DAD.09.03.04.05	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan

197	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.07.01	kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
198	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.07.02	system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
199	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.07.03	sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
200	PEMKABPESSEL-DAD.09.03.07.04	titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan

201	PEMKABPESSEL-DAD.09.04.01.01	Jumlah Menara Telekomunikasi Menurut Perusahaan Menara	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
202	PEMKABPESSEL-DAD.09.04.01.02	Jumlah Nagari dan Kampung Tanpa Sinyal Menurut Kecamatan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
203	PEMKABPESSEL-DAD.09.04.01.03	Jumlah Layanan Wifi Gratis Menurut Kecamatan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tahunan
204	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.01.01	fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
205	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.01.02	fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
206	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.01.03	pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan

207	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.01.04	usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
208	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.01.05	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
209	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.01.06	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
210	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.01.07	Jumlah Simpanan, Cadangan Hutang, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi (Ribu Rupiah)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
211	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.03.01	koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan

212	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.03.02	jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
213	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.03.03	koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
214	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.03.04	fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
215	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.03.05	koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan

216	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.03.06	Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
217	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.03.07	koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
218	PEMKABPESSEL-DAD.02.09.03.08	koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
219	PEMKABPESSEL-DAD.02.10.04.01	pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
220	PEMKABPESSEL-DAD.02.10.04.02	jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
221	PEMKABPESSEL-DAD.02.10.04.03	jumlah usaha mikro yang bermitra	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan

222	PEMKABPESSEL-DAD.02.10.04.04	usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
223	PEMKABPESSEL-DAD.02.10.04.05	jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
224	PEMKABPESSEL-DAD.02.10.04.06	usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
225	PEMKABPESSEL-DAD.02.10.04.07	jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
226	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.01.01	penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
227	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.01.02	instruktur bersertifikat kompetensi (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
228	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.01.03	jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
229	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.01.04	LPK yang terakreditasi (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan

230	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.01.05	LPK yang memiliki perizinan (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
231	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.01.06	penganggur yang dilatih (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
232	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.01.07	lulusan bersertifikat pelatihan (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
233	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.01.08	penyerapan lulusan (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
234	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.01.09	Lulusan bersertifikat kompetensi (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
235	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.01.10	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
236	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.01.11	pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
237	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.01	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan

238	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.02	pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
239	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.03	Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
240	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.04	Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
241	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.05	Pejabat Fungsional Pengantar Kerja (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
242	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.06	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
243	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.07	perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
244	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.08	penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
245	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.09	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan

246	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.10	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
247	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.11	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulungan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
248	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.12	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
249	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.13	pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
250	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.14	Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
251	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.15	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan

252	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.16	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
253	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.17	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
254	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.18	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan yang Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
255	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.19	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kepesertaan BPJS	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
256	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.02.20	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
257	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.03.01	perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan

258	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.03.02	tingkat produktivitas total (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
259	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.03.03	perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
260	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.03.04	perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
261	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.03.05	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
262	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.03.06	perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
263	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.03.07	perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
264	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.03.08	Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan

265	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.03.09	perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
266	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.04.01	perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
267	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.04.02	perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
268	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.04.03	jumlah perusahaan yang berselisih dengan tenaga kerja	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
269	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.04.04	Jumlah mogok kerja	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
270	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.04.05	Jumlah penutupan perusahaan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
271	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.04.06	Jumlah perselisihan kepentingan (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
272	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.04.07	Jumlah perselisihan PHK (Ketenagakerjaan)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan

273	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.04.08	pekerja/buruh yang ter-PHK	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
274	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.05.01	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
275	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.05.02	akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
276	PEMKABPESSEL-DAD.06.02.05.03	perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Tahunan
277	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.01.01	entitas pengelolaan destinasi wisata	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
278	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.01.02	wisatawan mancanegara per kebangsaan	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
279	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.01.03	promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
280	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.01.04	lokasi Wisata yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan

281	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.01.05	Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
282	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.01.06	Daftar Nama, Alamat Hotel/ Akomodasi, Jumlah Kamar, Tempat Tidur yang Tersedia dan Jarak dari Ibukota	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
283	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.01.07	Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
284	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.01.08	Jumlah Industri Pariwisata Menurut Kecamatan dan Jenis Usaha	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
285	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.01.09	Arus Wisatawan yang Berkunjung	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
286	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.01.10	Jumlah Objek Wisata Menurut Kecamatan dan Jenisnya	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
287	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.01.11	Daftar Nama , Alamat Objek Wisata Alam dan Jarak dari Ibukota	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
288	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.01.12	Daftar Nama , Alamat Objek Wisata Bahari dan Jarak dari Ibukota	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan

289	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.01.13	Daftar Nama , Alamat Objek Wisata Sejarah dan Jarak dari Ibukota	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
290	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.01.14	Daftar Nama , Alamat Objek Karya Wisata dan Jarak dari Ibukota	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
291	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.02.01	event luar negeri yang diikuti provinsi	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
292	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.02.02	industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
293	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.03.01	tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
294	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.03.02	tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
295	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.03.03	SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
296	PEMKABPESSEL-DAD.02.11.04.01	kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan

297	PEMKABPESSEL-DAD.06.04.02.01	pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
298	PEMKABPESSEL-DAD.06.04.02.02	pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
299	PEMKABPESSEL-DAD.06.04.02.03	pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
300	PEMKABPESSEL-DAD.06.04.02.04	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
301	PEMKABPESSEL-DAD.06.05.03.01	pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
302	PEMKABPESSEL-DAD.06.05.03.02	penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tahunan
303	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.02.01	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan

304	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.02.02	Panjang jalan yang dibangun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
305	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.02.03	Panjang jembatan yang dibangun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
306	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.02.04	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
307	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.02.05	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
308	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.02.06	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
309	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.02.07	Panjang jembatan yang direhabilitasi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
310	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.02.08	Panjang jalan yang dipelihara	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
311	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.02.09	Panjang jembatan yang dipelihara	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan

312	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.01	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
313	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.02	tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
314	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.03	tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
315	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.04	data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
316	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.05	data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
317	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.06	data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan

318	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.07	data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
319	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.08	data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
320	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.09	data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
321	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.10	data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan

322	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.11	data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
323	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.12	data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
324	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.13	data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
325	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.14	data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
326	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.15	data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan

327	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.16	data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
328	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.17	badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
329	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.18	usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
330	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.19	badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
331	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.20	badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
332	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.21	pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan

333	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.22	pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
334	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.23	kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
335	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.03.24	pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
336	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.05.01	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
337	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.05.02	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan

338	PEMKABPESSEL-DAD.03.01.05.03	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
339	PEMKABPESSEL-DAD.03.03.01.01	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
340	PEMKABPESSEL-DAD.03.03.01.02	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
341	PEMKABPESSEL-DAD.03.03.01.03	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
342	PEMKABPESSEL-DAD.03.03.01.04	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) dan Kondisi Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
343	PEMKABPESSEL-DAD.03.03.01.05	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan Dan Permukaan Jalan (Km)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
344	PEMKABPESSEL-DAD.03.03.01.06	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan Dan Kondisi Jalan (Km)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
345	PEMKABPESSEL-DAD.03.03.01.07	Banyaknya Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan

346	PEMKABPESSEL-DAD.03.05.04.01	desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
347	PEMKABPESSEL-DAD.03.05.04.02	desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
348	PEMKABPESSEL-DAD.03.05.04.03	lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
349	PEMKABPESSEL-DAD.03.05.04.04	peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
350	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.02	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan

351	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.03	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
352	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.04	masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) (Kependudukan/KB)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
353	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.05	stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK (Kependudukan/KB)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
354	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.06	Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan

355	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.07	Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
356	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.08	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
357	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.09	kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
358	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.10	kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
359	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.11	Jumlah Klinik, POS KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Kecamatan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan

360	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.12	Target dan Realisasi Akseptor KB Baru Menurut Kecamatan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
361	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.13	Jumlah Pencapaian Akseptor KB Baru Menurut Kecamatan dan Jenis KB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
362	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.14	Jumlah Pencapaian Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
363	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.15	Jumlah Keluarga menurut IBANGGA (Indeks Pembangunan Keluarga) Menurut Kecamatan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
364	PEMKABPESSEL-DAD.02.08.02.01	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tahunan

365	PEMKABPESSEL-DAD.02.08.02.02	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tahunan
366	PEMKABPESSEL-DAD.02.08.02.03	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tahunan
367	PEMKABPESSEL-DAD.02.08.02.04	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tahunan
368	PEMKABPESSEL-DAD.02.08.02.05	Kegiatan pameran penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tahunan
369	PEMKABPESSEL-DAD.02.08.02.06	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tahunan
370	PEMKABPESSEL-DAD.02.08.02.07	realisasi penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tahunan
371	PEMKABPESSEL-DAD.02.08.02.08	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tahunan
372	PEMKABPESSEL-DAD.02.08.02.09	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tahunan

373	PEMKABPESSEL-DAD.02.08.03.01	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tahunan
374	PEMKABPESSEL-DAD.02.08.03.02	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tahunan
375	PEMKABPESSEL-DAD.02.08.03.03	data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tahunan
376	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.01.01	Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
377	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.01.02	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
378	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.01.03	Jumlah Pengajar, Mahasiswa dan Lulusan pada Akademi Negeri dan Swasta	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
379	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.01.04	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamain	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
380	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.03.01	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan

381	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.03.02	peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
382	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.03.03	peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
383	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.03.04	kebutuhan minimal pendidik PAUD	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
384	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.03.05	pendidik pada PAUD	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
385	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.03.06	pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan

386	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.03.07	kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
387	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.03.08	anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
388	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.03.09	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
389	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.03.10	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Kelompok Bermain (KB) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan

390	PEMKABPESEL-DAD.06.01.03.11	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Satuan PAUD Sejenis (SPS) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
391	PEMKABPESEL-DAD.06.01.03.12	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Penitipan Anak (TPA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
392	PEMKABPESEL-DAD.06.01.03.13	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
393	PEMKABPESEL-DAD.06.01.05.01	SD Negeri Terakreditasi	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
394	PEMKABPESEL-DAD.06.01.05.02	peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan

395	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.05.03	peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
396	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.05.04	kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
397	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.05.05	pendidik pada jenjang sekolah dasar	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
398	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.05.06	kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
399	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.05.07	tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
400	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.05.08	pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
401	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.05.09	kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan

402	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.05.10	tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
403	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.05.11	anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
404	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.05.12	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
405	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.05.13	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
406	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.05.14	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Menurut Kondisinya di Kabupaten	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
407	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.05.15	Jumlah Peserta dan Lulusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan

408	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.01	SMP Negeri Terakreditasi	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
409	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.02	peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
410	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.03	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
411	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.04	kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
412	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.05	pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
413	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.06	kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
414	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.07	tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan

415	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.08	pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
416	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.09	anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
417	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.10	kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
418	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.11	tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
419	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.12	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan

420	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.13	(MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
421	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.14	(SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
422	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.15	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
423	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.16	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
424	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.17	Jumlah Kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Menurut Kondisinya	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
425	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.18	Jumlah Kelas Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta Menurut Kondisinya	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan

426	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.19	Jumlah Kelas Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Menurut Kondisinya	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
427	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.20	Jumlah Peserta dan Lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
428	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.21	Jumlah Peserta dan Lulusan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
429	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.06.22	Jumlah Peserta dan Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
430	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.09.01	satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
431	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.09.02	peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
432	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.09.03	peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan

433	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.09.04	kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
434	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.09.05	pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
435	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.09.06	pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
436	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.09.07	kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
437	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.09.08	kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
438	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.09.09	anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan

439	PEMKABPESSEL-DAD.06.01.09.10	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Pendidikan Kesetaraan di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
440	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.02.03	koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
441	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.01	obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
442	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.02	obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
443	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.03	obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan

444	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.04	SDM, lembaga dan pranata yang dibina Cagar Budaya (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
445	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.05	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
446	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.06	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
447	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.07	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
448	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.08	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
449	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.09	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan

450	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
451	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan (Cagar Budaya)	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
452	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
453	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
454	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
455	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
456	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.16	Pemetaan sdm cagar budaya dan Permuseuman	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan

457	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
458	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
459	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.03.19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	DINAS PENDIDIKAN	Tahunan
460	PEMKABPESSEL-DAD.09.07.06.09	arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
461	PEMKABPESSEL-DAD.09.07.06.10	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
462	PEMKABPESSEL-DAD.09.07.06.08	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
463	PEMKABPESSEL-DAD.02.01.01.01	Jumlah Usaha Industri Kecil Menurut Jenis Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan

464	PEMKABPESSEL-DAD.02.01.01.02	Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Menurut Jenis Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
465	PEMKABPESSEL-DAD.02.01.01.03	Nilai Produksi Industri Kecil Menurut Jenis Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
466	PEMKABPESSEL-DAD.02.01.04.01	jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
467	PEMKABPESSEL-DAD.02.01.04.02	terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
468	PEMKABPESSEL-DAD.02.01.04.03	Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
469	PEMKABPESSEL-DAD.02.01.04.04	jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan

470	PEMKABPESSEL-DAD.02.01.04.05	data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
471	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.01	perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
472	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.02	perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
473	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.03	penerbitan TDG (Perdagangan)	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
474	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.04	gudang yang tidak mempunyai TDG (Perdagangan)	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
475	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.05	Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan

476	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.06	pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
477	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.07	koefisien variasi harga antar waktu	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
478	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.08	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
479	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.09	Jumlah Pedagang dirinci menurut Kecamatan	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
480	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.01.10	Harga Rata-Rata Komoditi Ekspor Menurut Bulan	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
481	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.02.02	alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
482	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.02.03	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah)	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan

483	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.02.04	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
484	PEMKABPESSEL-DAD.03.02.03.01	kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
485	PEMKABPESSEL-DAD.03.02.03.02	satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
486	PEMKABPESSEL-DAD.03.02.03.03	satuan pemukiman transmigrasi yang dibina	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	Tahunan
487	PEMKABPESSEL-DAD.03.03.01.08	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Menurut Bulan dan Jenis Kendaraan	DINAS PERHUBUNGAN	Bulanan
488	PEMKABPESSEL-DAD.03.03.01.09	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Menurut Umur dan Jenis Kendaraan	DINAS PERHUBUNGAN	Tahunan
489	PEMKABPESSEL-DAD.03.03.01.10	Arus Penumpang yang Datang dan Pergi Menurut Bulan	DINAS PERHUBUNGAN	Bulanan
490	PEMKABPESSEL-DAD.03.03.04.01	fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	DINAS PERHUBUNGAN	Tahunan

491	PEMKABPESSEL-DAD.03.03.04.02	pelayanan uji berkala transportasi	DINAS PERHUBUNGAN	Bulanan
492	PEMKABPESSEL-DAD.03.03.04.03	Penetapan tariff angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	DINAS PERHUBUNGAN	Tahunan
493	PEMKABPESSEL-DAD.03.03.04.04	pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	DINAS PERHUBUNGAN	Tahunan
494	PEMKABPESSEL-DAD.02.06.01.02	Luas Area dan Produksi Perikanan Darat Menurut Kecamatan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Tahunan
495	PEMKABPESSEL-DAD.02.06.01.03	Jumlah Nelayan Perikanan Laut Menurut Kecamatan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Tahunan
496	PEMKABPESSEL-DAD.02.06.01.04	Jumlah Perahu Penangkap Ikan Laut Menurut Kategori dan Kecamatan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Tahunan
497	PEMKABPESSEL-DAD.02.06.01.05	Jumlah Alat Penangkapan Ikan Laut Menurut Jenis Alat Tangkap dan Kecamatan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Tahunan
498	PEMKABPESSEL-DAD.02.06.01.06	Jumlah Produksi dan Nilai Ikan Laut Segar Menurut Kecamatan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Tahunan

499	PEMKABPESSEL-DAD.02.06.01.07	Jumlah Luas Dan Produksi Ikan Kolam Menurut Kecamatan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Tahunan
500	PEMKABPESSEL-DAD.07.04.04.01	rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) (Kelautan dan Perikanan)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Tahunan
501	PEMKABPESSEL-DAD.07.04.04.02	Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Tahunan
502	PEMKABPESSEL-DAD.07.04.04.03	Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Tahunan
503	PEMKABPESSEL-DAD.07.04.04.04	pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Tahunan
504	PEMKABPESSEL-DAD.07.04.04.05	benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Tahunan

505	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.02.01	naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
506	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.02.02	naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
507	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.05.01	ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
508	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.05.02	ketermanfaatkan perpustakaan oleh Masyarakat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
509	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.05.03	ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
510	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.05.04	perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
511	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.05.05	pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
512	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.05.06	Jumlah Pustaka Menurut Jenisnya Dirinci Berdasarkan Kecamatan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan

513	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.05.07	Jumlah Judul Buku Perpustakaan Umum Daerah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
514	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.05.08	Jumlah Pengunjung Pustaka Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Jenis Pengunjung	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
515	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.05.09	Jumlah Perpustakaan Sekolah, Jumlah Titik Layanan dan Jumlah Pengunjung Menurut Kecamatan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
516	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.05.10	Jumlah Perpustakaan Nagari, Jumlah Titik Layanan dan Jumlah Pengunjung Menurut Kecamatan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
517	PEMKABPESSEL-DAD.08.02.05.11	Jumlah Taman Baca Masyarakat, Jumlah Titik Layanan dan Jumlah Pengunjung Menurut Kecamatan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
518	PEMKABPESSEL-DAD.09.07.06.01	arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
519	PEMKABPESSEL-DAD.09.07.06.02	arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
520	PEMKABPESSEL-DAD.09.07.06.03	jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan

521	PEMKABPESEL-DAD.09.07.06.04	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
522	PEMKABPESEL-DAD.09.07.06.05	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
523	PEMKABPESEL-DAD.09.07.06.06	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
524	PEMKABPESEL-DAD.09.07.06.07	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tahunan
525	PEMKABPESEL-DAD.02.03.01.01	Penerbitan izin usaha pertanian	DINAS PERTANIAN	Tahunan
526	PEMKABPESEL-DAD.02.03.01.02	jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	DINAS PERTANIAN	Tahunan
527	PEMKABPESEL-DAD.02.03.01.03	fasilitasi penanggulangan bencana (bidang Pertanian)	DINAS PERTANIAN	Tahunan

528	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.01.04	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
529	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.01.05	Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	DINAS PERTANIAN	Tahunan
530	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.01.06	Produksi Tanaman Pangan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	DINAS PERTANIAN	Tahunan
531	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.01.07	Banyaknya Pemakaian Pupuk Untuk Tanaman Padi (ton)	DINAS PERTANIAN	Tahunan
532	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.01.08	Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
533	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.01.09	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
534	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.01.10	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah- buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman	DINAS PERTANIAN	Tahunan
535	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.01.11	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah- buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman	DINAS PERTANIAN	Tahunan

536	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.01.12	Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	DINAS PERTANIAN	Tahunan
537	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.01.13	Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	DINAS PERTANIAN	Tahunan
538	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.01.14	Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman	DINAS PERTANIAN	Tahunan
539	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.01.15	Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman	DINAS PERTANIAN	Tahunan
540	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.01.16	Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	DINAS PERTANIAN	Tahunan
541	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.01.17	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman	DINAS PERTANIAN	Tahunan
542	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.03.01	Sarana pertanian yang diberikan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
543	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.03.02	Prasarana pertanian yang digunakan	DINAS PERTANIAN	Tahunan

544	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.03.04	Persentase prasarana yang digunakan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
545	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.03.05	Jumlah Alat Pengolah Gabah Menurut Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
546	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.04.01	infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
547	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.04.02	Penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	DINAS PERTANIAN	Tahunan
548	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.04.03	regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	DINAS PERTANIAN	Tahunan
549	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.04.04	kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	DINAS PERTANIAN	Tahunan
550	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.04.05	peta ketahanan dan kerentanan pangan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
551	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.04.06	Penanganan kerawanan pangan	DINAS PERTANIAN	Tahunan

552	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.04.07	Penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
553	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.04.08	pengawasan keamanan pangan segar	DINAS PERTANIAN	Tahunan
554	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.04.09	Ketersediaan Energi Per Kapita Menurut Kelompok Bahan Makanan (kkal/kapita/hari)	DINAS PERTANIAN	Tahunan
555	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.04.10	Ketersediaan Protein Per Kapita Menurut Kelompok Bahan Makanan (kkal/kapita/hari)	DINAS PERTANIAN	Tahunan
556	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.04.11	Ketersediaan Lemak Per Kapita Menurut Kelompok Bahan Makanan (kkal/kapita/hari)	DINAS PERTANIAN	Tahunan
557	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.04.12	Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat dan Pemerintah Dirinci Menurut Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
558	PEMKABPESSEL-DAD.02.03.04.13	Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LPDM), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Toko Tani Indonesia (TTI) Menurut Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan

559	PEMKABPESSEL-DAD.02.04.01.01	Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	DINAS PERTANIAN	Tahunan
560	PEMKABPESSEL-DAD.02.04.01.02	Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	DINAS PERTANIAN	Tahunan
561	PEMKABPESSEL-DAD.02.04.01.03	Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman	DINAS PERTANIAN	Tahunan
562	PEMKABPESSEL-DAD.02.04.01.04	Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman	DINAS PERTANIAN	Tahunan
563	PEMKABPESSEL-DAD.02.04.01.05	Jumlah Alat Pemberantas Hama yang Ada Pada Petani Menurut Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
564	PEMKABPESSEL-DAD.02.04.01.06	Jumlah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Menurut Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
565	PEMKABPESSEL-DAD.02.04.01.07	Jumlah Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Menurut Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
566	PEMKABPESSEL-DAD.02.05.01.01	Jumlah Ternak Menurut Jenis dan Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan

567	PEMKABPESSEL-DAD.02.05.01.02	Jumlah Produksi Daging Menurut Jenis dan Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
568	PEMKABPESSEL-DAD.02.05.01.03	Jumlah Ternak Unggas Menurut Jenis dan Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
569	PEMKABPESSEL-DAD.02.05.01.04	Jumlah Produksi Telur Unggas Menurut Jenis dan Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
570	PEMKABPESSEL-DAD.02.05.01.05	Jumlah Produksi Daging Unggas Menurut Jenis dan Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
571	PEMKABPESSEL-DAD.02.05.01.06	Jumlah Konsumsi Daging Menurut Jenis dan Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
572	PEMKABPESSEL-DAD.02.05.01.07	Jumlah Konsumsi Daging Unggas Menurut Jenis dan Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
573	PEMKABPESSEL-DAD.02.06.01.01	Jumlah Pengusaha Perikanan Laut Menurut Kecamatan	DINAS PERTANIAN	Tahunan
574	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.02.01	bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

575	PEMKABPESEL-DAD.03.04.02.02	bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
576	PEMKABPESEL-DAD.03.04.02.03	bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
577	PEMKABPESEL-DAD.03.04.03.01	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
578	PEMKABPESEL-DAD.03.04.03.02	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
579	PEMKABPESEL-DAD.03.04.03.03	kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
580	PEMKABPESEL-DAD.03.04.03.04	pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

581	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.05	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
582	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.06	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
583	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.07	prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
584	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.08	luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
585	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.09	unit peningkatan kualitas RTLH	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
586	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.10	luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
587	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.11	rumah di kab/kota	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

588	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.12	unit PK RTLH	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
589	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.13	rumah tidak layak huni	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
590	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.14	rumah yang tidak dihuni	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
591	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.15	Rasio rumah dan KK	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
592	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.16	rumah pembangunan baru	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
593	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.17	perumahan yang terfasilitasi PSU	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
594	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.18	unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

595	PEMKABPESEL-DAD.03.04.03.19	unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
596	PEMKABPESEL-DAD.03.04.03.20	unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
597	PEMKABPESEL-DAD.03.04.03.21	perumahan yang terfasilitasi RTNH	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
598	PEMKABPESEL-DAD.03.04.03.22	unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
599	PEMKABPESEL-DAD.03.04.03.23	pengembang yang tersertifikasi	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
600	PEMKABPESEL-DAD.03.04.03.24	pengembang yang terregistrasi	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
601	PEMKABPESEL-DAD.03.04.03.25	pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

602	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.26	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
603	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.27	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
604	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.28	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
605	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.03.29	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

606	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.05.01	rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
607	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.05.02	rumah yang terkena bencana alam	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
608	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.05.03	RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
609	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.05.04	unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
610	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.05.05	unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
611	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.05.06	unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
612	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.05.07	unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

613	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.05.08	RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
614	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.05.09	luasan dan lokasi pencadangan lahan	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
615	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.05.10	rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
616	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.05.11	rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
617	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.05.12	rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

618	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.05.13	rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
619	PEMKABPESSEL-DAD.03.04.05.14	rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
620	PEMKABPESSEL-DAD.03.05.01.01	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
621	PEMKABPESSEL-DAD.03.05.01.02	IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
622	PEMKABPESSEL-DAD.03.05.01.03	bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
623	PEMKABPESSEL-DAD.03.06.02.01	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota (Pertanahan)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

624	PEMKABPESSEL-DAD.03.06.02.02	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
625	PEMKABPESSEL-DAD.03.06.02.03	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
626	PEMKABPESSEL-DAD.03.06.02.04	Dokumen Izin membuka tanah	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
627	PEMKABPESSEL-DAD.03.06.02.05	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
628	PEMKABPESSEL-DAD.03.06.03.01	total luasan (Ha) pengadaan tanah	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
629	PEMKABPESSEL-DAD.03.07.03.01	dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

630	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.01.01	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
631	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.01.02	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
632	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.01.03	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
633	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.01.04	kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
634	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.01.05	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

635	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.01	rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
636	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.02	rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
637	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.03	rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
638	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.04	rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
639	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.05	rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

640	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.06	rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
641	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.07	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
642	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.08	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
643	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.09	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
644	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
645	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
646	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

647	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
648	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
649	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.15	data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
650	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.16	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
651	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.17	jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
652	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.18	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
653	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.19	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan

654	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.20	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
655	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.05.21	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
656	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.06.01	Indeks kualitas air (IKA)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
657	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.06.02	Indeks Kualitas Udara (IKU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
658	PEMKABPESSEL-DAD.07.05.06.03	Indeks tutupan hutan (ITH)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tahunan
659	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.01.01	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Menurut Kecamatan	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
660	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.01	layanan data dan pengaduaan yang dimiliki (Urusan Sosial)	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan

661	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.02	data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
662	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.03	TimReaksi Cepat yang dibentuk (Urusan Sosial)	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
663	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.04	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
664	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.05	kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki (Urusan Sosial)	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
665	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.06	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
666	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.07	rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan

667	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.08	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
668	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.09	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
669	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.10	alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
670	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.11	paket perbekalan kesehatan yang tersedia (Urusan Sosial)	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
671	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.12	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
672	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.13	tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan

673	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.14	pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
674	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.15	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
675	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.16	bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
676	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.17	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan

677	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.18	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
678	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.19	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
679	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.20	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
680	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.03.21	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan

681	PEMKABPESSEL-DAD.04.03.02.01	organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
682	PEMKABPESSEL-DAD.04.03.02.02	kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
683	PEMKABPESSEL-DAD.04.03.02.03	lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
684	PEMKABPESSEL-DAD.04.03.02.04	lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
685	PEMKABPESSEL-DAD.04.03.02.05	kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
686	PEMKABPESSEL-DAD.04.03.02.06	korban kekerasan perempuan yang terlayani	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan

687	PEMKABPESSEL-DAD.04.03.03.01	lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih Pengarusutamaan Gender	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
688	PEMKABPESSEL-DAD.04.03.03.02	program Pengarusutamaan Gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
689	PEMKABPESSEL-DAD.04.03.04.01	media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
690	PEMKABPESSEL-DAD.04.03.04.02	lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal (Perlindungan Anak)	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
691	PEMKABPESSEL-DAD.04.03.04.03	korban kekerasan anak yang terlayani	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
692	PEMKABPESSEL-DAD.04.03.04.04	lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan

693	PEMKABPESSEL-DAD.04.03.04.05	lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
694	PEMKABPESSEL-DAD.04.03.05.01	lembaga penyediaaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tahunan
695	PEMKABPESSEL-DAD.09.07.04.01	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	INSPEKTORAT	Tahunan
696	PEMKABPESSEL-DAD.09.07.04.02	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	INSPEKTORAT	Tahunan

697	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.13	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tahunan
698	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.17	pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tahunan
699	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.18	aparatur Damkar selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tahunan
700	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.19	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tahunan
701	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.20	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tahunan

702	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.21	aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tahunan
703	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.22	relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tahunan
704	PEMKABPESSEL-DAD.04.02.06.23	peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tahunan
705	PEMKABPESSEL-DAD.05.02.01.01	pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tahunan
706	PEMKABPESSEL-DAD.05.02.01.02	Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tahunan
707	PEMKABPESSEL-DAD.05.02.01.03	Perda dan Perkada yang ditegakkan (Pol PP)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tahunan
708	PEMKABPESSEL-DAD.05.02.01.04	Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tahunan

709	PEMKABPESSEL-DAD.05.02.01.05	SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tahunan
710	PEMKABPESSEL-DAD.05.02.01.06	sarana prasarana minimal (Ketertiban Umum)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tahunan
711	PEMKABPESSEL-DAD.02.02.02.01	pupuk dan pestisida yang tersalurkan	SEKRETARIAT DAERAH	Tahunan
712	PEMKABPESSEL-DAD.08.01.01.01	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan	SEKRETARIAT DAERAH	Tahunan
713	PEMKABPESSEL-DAD.08.01.04.01	Jumlah Jemaah Haji Menurut Pekerjaan	SEKRETARIAT DAERAH	Tahunan
714	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.01	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN/PERIKANAN DAN PANGAN	Tahunan
715	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.02	Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tahunan
716	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.03	Nama-Nama Sungai, Lokasi dan Panjangnya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan
717	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.04	Nama Pulau, Lokasi dan Luasnya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahunan

718	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.06	Jumlah Desa /Kelurahan Menurut Kecamatan	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
719	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.07	Daftar Nama Nagari dan Kampung Menurut Kecamatan	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
720	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.08	Jumlah Nagari dan Kampung Menurut Kecamatan	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tahunan
721	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.09	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin	SEKRETARIAT DPRD	Tahunan
722	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.10	Daftar Nama Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Masa Jabatan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	SEKRETARIAT DPRD	Tahunan
723	PEMKABPESSEL-DAD.09.01.04.20	Daftar Nama Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Masa Jabatan, dan Pendidikan yang Ditamatkan	SEKRETARIAT DAERAH	Tahunan
724	PEMKABPESSEL-DAD.09.02.08.01	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	SEKRETARIAT DAERAH	Tahunan

NO	kode	Elemen Data	Produsen Data/Penanggung Jawab	Jadwal Rilis
725	PEMKABPESSEL-DAD.09.02.08.02	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	SEKRETARIAT DAERAH	Tahunan
726	PEMKABPESSEL-DAD.09.02.08.03	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan (UKPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH	Tahunan

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal Mei 2023

BUPATI PESISIR SELATAN

